

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
INTISARI	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Keaslian Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Tentang Penuntutan	12
1. Definisi Penuntutan	12
2. Kewenangan Melakukan Penuntutan	13
B. Tinjauan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Di Bidang Penuntutan	15
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	17
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	17
2. Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	18
a. Ketentuan Umum.....	18
b. Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	22
c. Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang	23
d. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Tindak Pidana Pencucian Uang	24
D. Tinjauan Tentang Hukum Progresif	25

1. Pengertian Hukum Progresif	25
2. Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis dan Sifat Penelitian	29
1. Jenis Penelitian	29
2. Sifat Penelitian	30
B. Jenis Data	31
C. Lokasi dan Subjek Penelitian	34
1. Lokasi Penelitian	34
2. Subjek Penelitian	34
D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data	36
1. Alat Pengumpulan Data.....	36
2. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Jalannya Penelitian	37
F. Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Dasar Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2014/PN.JKT.PST.	40
1. Gambaran Umum Tentang Kewenangan	40
2. Pengaturan Penuntutan Dalam Hukum Acara Pidana	42
3. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi.....	46
a. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi	46
b. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi	51

4. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2014/PN.JKT.PST.	55
5. Analisis Terhadap Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2014/PN.JKT.PST.	64
B. Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Teori Hukum Progresif	69
1. Urgensi Dan Penerapan Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana	69
2. Perlunya Penemuan Hukum	73
3. Melakukan Penemuan Hukum Yang Progresif	76
4. Tidak Diterapkannya Asas-Asas Hukum Dalam Penemuan Hukum Yang Progresif	80
5. Pengesampingan Asas Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif	82
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88